

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum (pemilu) merupakan instrumen yang digunakan rakyat untuk mewujudkan partisipasinya dalam sistem demokrasi. Masyarakat Indonesia yang telah memenuhi syarat sesuai undang-undang untuk menjadi pemilih, dapat ikut serta dalam menyampaikan hak suaranya secara langsung melalui pemungutan suara. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Kedaulatan rakyat yang dimaksud adalah pelaksanaan sistem demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Pelaksanaan prinsip demokrasi yang sesungguhnya adalah menginginkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan khususnya proses kehidupan politik berbangsa dan bernegara. Setiap warga negara dijamin hak politiknya yang diatur dalam Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal tersebut menjelaskan bahwa “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan”. Berdasarkan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali memiliki hak untuk ikut serta dalam pemilu dan dapat menggunakan hak politiknya secara luas dalam hal memilih ataupun dipilih tanpa terikat oleh perbedaan latar belakang, suku, agama, ras, golongan, dan status sosialnya dalam masyarakat.

Sejak pemilu tahun 1999, Indonesia memasuki babak baru bagi pelaksanaan demokrasi karena pada tahun tersebut warga negara yang sudah memiliki hak pilih dapat memilih wakil rakyatnya secara langsung untuk duduk di kursi legislatif. Selanjutnya pada tahun 2004 selain pemilihan legislatif secara langsung, untuk pertama kalinya rakyat Indonesia memilih presiden dan wakil presiden dalam satu pasangan secara langsung, sehingga masyarakat mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam proses politik. Proses ini berlanjut setelah 5 tahun tepatnya pada tahun 2009 yaitu diadakan kembali pemilihan legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung.

Menjelang tahun 2014, pemilihan umum akan kembali digelar. Tahun 2014 dapat dikatakan sebagai tahun politik karena pada tahun tersebut akan berlangsung pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD yang diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia. Pemilu legislatif ini tentunya akan diwarnai dengan berbagai aktivitas politik. Pemilu legislatif yang akan berlangsung pada tahun 2014 ini diikuti oleh calon legislatif dari partai politik (untuk anggota DPRD, DPR) dan perwakilan daerah atau calon perseorangan (untuk DPD).

Pemilihan legislatif 2014 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu pada Pasal 3 Bab II yang berbunyi “pemilu yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota”. Kemudian dijelaskan pula dalam undang-undang ini bahwa yang dimaksud dengan pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga pemilu legislatif tahun 2014 mendatang akan menjadi sebuah konstelasi politik serta momentum bagi rakyat untuk secara langsung menentukan wakilnya yang diharapkan mampu membawa perbaikan di berbagai bidang.

Pelaksanaan pemilu dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan jika ada sosialisasi kepada masyarakat sebagai pemilih. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu serta kegiatan politik lainnya yang berkaitan dengan pengambilan keputusan pemerintah. Sedangkan sosialisasi politik itu diartikan sebagai suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik (Efriza, 2012: 4). Berdasarkan ruang lingkup yang lebih luas, sosialisasi politik pada setiap individu sebenarnya telah terjadi secara disadari atau tidak disadari yang berkesinambungan terjadi pada seseorang mulai dari anak-anak, dewasa, hingga tua. Sosialisasi politik juga ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi

dan kebudayaan dimana individu tersebut berada serta oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadian.

Sosialisasi politik kepada seseorang diawali pada masa anak-anak biasanya diperoleh dari interaksinya dengan agen-agen sosialisasi. Agen sosialisasi merupakan individu atau kelompok yang secara langsung ataupun tidak langsung memberikan pengenalan awal mengenai politik kepada seseorang. Agen sosialisasi politik biasanya berada dalam ruang lingkup yang dekat dengan kehidupan seseorang dan berkenaan langsung dalam proses pemahaman mengenai politik. Agen sosialisasi yang terdekat adalah keluarga dimana seorang anak memiliki intensitas lebih banyak dengan keluarga. Menurut Almond (1984: 330) setidaknya ada tiga agen sosialisasi yang mempengaruhi sikap politik seseorang, yaitu keluarga, sekolah dan tempat kerja. Selain itu terdapat pula kelompok pergaulan, media massa dan kontak-kontak politik langsung yang mampu menimbulkan efek berupa sifat dan reaksi mengenai politik.

Sosialisasi politik merupakan serangkaian proses yang terdiri dari pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap yang disalurkan individu-individu dan kelompok-kelompok individu dalam satu sistem politik untuk kemudian membentuk satu tingkah laku politik individu. Lebih lanjut dijelaskan Milbrath dalam Rush (2007: 48) bahwa beberapa rangsangan dalam sosialisasi itu bisa diterima sedang rangsangan lainnya ditolak sedemikian rupa sehingga perilaku politik khususnya dalam hal partisipasi politik itu berbeda dari seorang individu ke individu lainnya.

Pada setiap penyelenggaraan pemilu, biasanya selalu terjadi penambahan mata pilih. Peningkatan jumlah pemilih merupakan indikator adanya penambahan jumlah pemilih pemula. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam berita yang dimuat pada ([www.news.liputan6.com](http://www.news.liputan6.com)) bahwa “besarnya pemilih pemula diperkirakan mencapai 19% atau 36 jutaan dari 189 juta penduduk yang memiliki hak pilih”. Meskipun jumlah pemilih pemula lebih sedikit dibandingkan jumlah kelompok pemilih lain tapi secara politis pemilih pemula memiliki hak sama dengan pemilih lain dan ini merupakan langkah awal bagi partisipasi mereka ke depan. Partisipasi dalam penyelenggaraan pemilu legislatif merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan keputusan politik.

Dalam pelaksanaan pemilu legislatif di Lampung yang akan digelar pada tanggal 9 April 2014 dengan jumlah pemilih berdasarkan DPT (Daftar Pemilih Tetap) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 5.905.507 jiwa yang tersebar di 16.492 TPS ([www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)). Jumlah ini meningkat dibandingkan pada pemilu legislatif 2009, sebagaimana hasil prariset yang dilakukan di kantor KPU Kabupaten Lampung Tengah serta referensi dari modul sosialisasi pemilih pemula sehingga diketahui bahwa secara nasional jumlah pemilih pemula diperkirakan bertambah 20% dari jumlah mata pilih pada pemilu sebelumnya yang artinya dalam setiap provinsi atau kabupaten/kota rata-rata penambahan mata pilih didominasi oleh pemilih pemula (Tim Penyusun Modul KPU Lampung Tengah, 2013).

Optimalisasi pemilih pemula merupakan hal yang perlu dilakukan mengingat pemilih pemula dalam undang-undang pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah mereka yang berusia 17-21 tahun, yang telah memiliki hak suara dalam pemilu dan pemilu kepala daerah. Selanjutnya dijelaskan dalam Bab IV Pasal 19 bahwa “yang memiliki hak memilih adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin”. Pemilih pemula merupakan pemilih yang baru memasuki usia hak pilih sehingga pengetahuan politiknya masih rendah untuk menentukan pilihan politiknya pada pemilu legislatif apalagi dengan banyaknya kategori pemilihan suara untuk anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD.

Jika dilihat dari segi kuantitas, jumlah pemilih pemula yang selalu berubah pada setiap pemilu mengindikasikan peluang yang besar bagi peserta pemilu untuk meraih suara pemilih pemula. Pemilih pemula menjadi sumber suara politik yang strategis namun belum maksimal dalam pemberian sosialisasi khusus kepada pemilih pemula. Menurut M. Rosit selaku peneliti dari *The Political Literacy Institute Jakarta* dan juga Dosen *Public Relations Politic* di Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) bahwa “dari sekian banyak potensi pemilih yang beraneka ragam pada pemilu 2014, tak satupun partai politik peserta pemilu sampai saat ini yang secara khusus melirik keberadaan pemilih pemula padahal suaranya sangat potensial dalam pemilu 2014” ([www.news.liputan6.com](http://www.news.liputan6.com)).

Karakter pemilih pemula biasanya masih labil, cenderung mengikuti pilihan teman dan baru pertama kali terlibat dalam pemilihan umum sehingga pengetahuan politiknya masih minim. Ini diperkuat dengan pernyataan Dedy Hermawan selaku Kepala Pusat Studi Kebijakan Publik Universitas Lampung mengenai pemilih pemula dalam berita yang dimuat dalam situs ([www.lampost.co.id](http://www.lampost.co.id)) bahwa “banyak pemilih pemula yang belum paham mekanisme pemilu. Bahkan hari H pencoblosan juga belum tahu. Ketidaktahuan pemilih pemula, khususnya pelajar SMA, disebabkan sosialisasi penyelenggara pemilu belum efektif baik sosialisasi di media massa maupun sosialisasi ke sekolah, mengingat pemilih pemula belum pernah merasakan menyampaikan hak politiknya”.

Keikutsertaan atau partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu legislatif 2014 merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan mengingat besarnya jumlah pemilih pemula dan kelompok pemilih ini baru pertama kali ikut serta dalam pemilu. Menurut J Kristiadi selaku pengamat politik dari *Center of Strategic and International Studies* (CSIS) mengungkapkan “tantangan terbesar pemilu 2014 adalah mengajak generasi muda untuk ikut menentukan wakil rakyat maupun pemimpin bangsa ini dengan menggunakan hak pilihnya” ([www.kompas.com](http://www.kompas.com)).

Salah satu tolak ukur bagi tingkat partisipasi politik masyarakat adalah melalui hasil suatu pemilihan umum. Partisipasi politik akan semakin besar jika adanya sosialisasi kepada pemilih terhadap pelaksanaan pemilu, tidak terkecuali sosialisasi kepada pemilih pemula yang baru pertama kali menggunakan hak

pilihnya. Masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan merasa kebingungan tentang tata cara mencoblos serta dengan banyaknya calon legislatif pada pemilu legislatif. Sosialisasi diperlukan juga untuk memberikan pengetahuan kepada pemilih terutama pemilih pemula mengenai jadwal pelaksanaan dan tata cara mencoblos serta pengetahuan lain yang dianggap perlu sehingga masyarakat selaku pemilih memiliki pengetahuan yang baik mengenai pemilu legislatif serta mampu menjadi pemilih pemula yang cerdas.

Seorang anak sebagai pemilih pemula yang memiliki kemampuan untuk ambil bagian dalam pembicaraan di dalam keluarga, sekolah, dan pekerjaan merupakan hubungan yang menarik untuk dikaji jika hal tersebut dikaitkan antara peran serta dalam bidang tersebut dengan kemampuan berpartisipasi dalam politik. Hal lain yang dapat mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula adalah intervensi orang tua maupun lingkungan. Partisipasi pemilih pemula dalam pemilu seperti pada pemilu legislatif memiliki kecenderungan sebatas melaksanakan hak namun kesadaran akan esensi pemilu itu sendiri belum sepenuhnya dipahami. Perilaku pemilih pemula masih berkaitan erat dengan faktor sosiologis dan psikologis. Usia pemilih pemula yang berkisar antara 17-21 tahun rentan untuk dipengaruhi politik praktis terutama karena motivasi yang ada dalam diri pemilih pemula dipengaruhi oleh rasa penasaran untuk ikut pemilu pertama kali.

Jika dicermati secara mendalam, tempat belajar politik pemilih pemula biasanya tidak jauh dari ruang yang dianggap memberikan rasa nyaman bagi



diri mereka. Berdasarkan hal tersebut, menarik untuk dikaji mengenai agen-agen sosialisasi yang meliputi keluarga, sekolah/kampus/tempat kerja, teman, media massa, dan kontak-kontak politik langsung untuk mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula.

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten di Lampung juga memiliki kewajiban ikut menyelenggarakan pemilu legislatif serentak pada 9 April 2014. Jumlah pemilih di Kabupaten Lampung Tengah merupakan yang terbanyak dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung yaitu berjumlah 896.877 jiwa. Jumlah ini didapat dari *website* KPU bersumber pada ([www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)) sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Lampung pada pemilu legislatif 2014

No	Kabupaten/Kota	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		Total
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Bandar Lampung	1.639	321.277	313.311	634.588
2	Metro	255	54.370	54.941	109.311
3	Lampung Barat	858	167.707	150.149	317.856
4	Lampung Selatan	1.859	352.868	336.243	689.111
5	Lampung Tengah	2.455	460.922	435.955	896.877
6	Lampung Timur	1.922	393.928	377.302	771.230
7	Lampung Utara	1.266	225.173	221.427	446.600
8	Mesuji	391	75.047	68.590	143.637
9	Pesawaran	1.100	163.267	153.578	316.845
10	Pringsewu	1.002	157.972	151.802	309.774
11	Tanggamus	1.581	235.088	218.353	453.441
12	Tulang Bawang	778	148.933	136.154	285.087
13	Tulang B. Barat	553	100.435	95.326	195.761
14	Way Kanan	833	172.742	162.647	335.389
	Total	16.492	3.029.729	2.875.788	5.905.597

Sumber: data sekunder dari *website* KPU diolah tahun 2013

Jika dirunut ke belakang, pemilu terakhir yang diadakan di Kabupaten Lampung Tengah terjadi pada tahun 2010 yaitu pemilihan umum kepala daerah

untuk pengisian jabatan bupati dan wakil bupati. Berdasarkan jumlah mata pilih pada pemilu terakhir yaitu dalam pemilu kepala daerah tahun 2010, jumlah mata pilih untuk pemilu 2014 mengalami penambahan 22% dan ini diperkirakan 20% terdiri dari pemilih pemula (Tim Penyusun Modul KPU Lampung Tengah, 2013). Selanjutnya berdasarkan data dan wawancara di KPU Kabupaten Lampung Tengah, dari segi partisipasi politik pada pemilu legislatif 2009 lalu, persentase jumlah partisipasi politik masyarakat yang menggunakan hak pilih di Kabupaten Lampung Tengah terbesar berada di Kecamatan Gunung Sugih (hasil wawancara terlampir).

Persentase tingkat partisipasi didasarkan pada jumlah orang yang menggunakan hak pilih kemudian dibandingkan dengan jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) di masing-masing kecamatan. Kecamatan Gunung Sugih dengan persentase partisipasi politik tertinggi juga termasuk di dalamnya terdapat keterlibatan pemilih pemula. Berdasarkan data hasil prariset yang dilakukan peneliti di Kantor KPU Kabupaten Lampung Tengah, terdapat 45.775 pemilih yang terdapat di Kecamatan Gunung Sugih serta tersebar di 15 desa/kelurahan (data hasil pleno KPU Lampung Tengah tanggal 16 Januari 2014). Jumlah tersebut sebagaimana ditulis dalam tabel berikut:

Tabel 2. Daftar Pemilih Tetap (DPT) tiap kelurahan di Kecamatan Gunung Sugih

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
1	Bangun Rejo	8	1.493	1.346	2.839
2	Buyut Ilir	11	2.093	1.973	4.066
3	Buyut Udik	9	1.843	1.706	3.549
4	Buyut Utara	6	1.154	1.118	2.272
5	Fajar Bulan	11	2.209	2.164	4.373
6	Gunung S. Raya	10	1.886	1.774	3.660
7	Gunung Sari	7	1.288	1.250	2.538
8	Gunung Sugih	9	1.399	1.306	2.705
9	Komering Agung	7	1.174	1.110	2.284
10	Komering Putih	9	1.693	1.631	3.324
11	Putra Buyut	7	1.366	1.220	2.586
12	Seputih Jaya	7	1.462	1.326	2.824
13	Terbanggi Agung	8	1.395	1.383	2.778
14	Terbanggi Subing	11	2.389	2.391	4.780
15	Wonosari	3	618	579	1.197
	Total	123	23.462	22.313	45.775

Sumber: data sekunder dari KPU Lampung Tengah tahun 2014

Berdasarkan data tersebut, pemilih pemula dihitung secara manual pada DPT yang terdapat di KPU Kabupaten Lampung Tengah dengan tanggal validasi hasil sidang pleno 16 Januari 2014. Cara yang digunakan untuk menghitung jumlah pemilih pemula yaitu dengan mencari melalui (*Ctrl + Find*) pada lembar PDF. Pemilih pemula yang diasumsikan adalah pemilih dengan usia antara 17-21 atau lahir pada tahun 1993, 1994, 1995, 1996, dan 1997. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka diperoleh jumlah pemilih pemula di Kecamatan Gunung Sugih sebanyak 4.651 pemilih sebagai mana ditulis dalam tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah pemilih pemula tiap kelurahan di Kecamatan Gunung Sugih pada pemilu legislatif 2014

No	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Pemula
1	Bangun Rejo	8	306
2	Buyut Ilir	11	402
3	Buyut Udik	9	310
4	Buyut Utara	6	220
5	Fajar Bulan	11	410
6	Gunung Sugih Raya	10	359
7	Gunung Sari	7	273
8	Gunung Sugih	9	236
9	Komering Agung	7	221
10	Komering Putih	9	314
11	Putra Buyut	7	365
12	Seputih Jaya	7	308
13	Terbanggi Agung	8	347
14	Terbanggi Subing	11	451
15	Wonosari	2	129
	Jumlah	122	4.651

Sumber: data dari hasil wawancara prariset di KPU Lampung Tengah tahun 2014 sebagaimana berita acara terlampir

Penelitian ini mengambil lokasi di Terbanggi Subing yang merupakan kelurahan/desa dengan jumlah pemilih pemula terbanyak dibanding kelurahan/desa lain di Kecamatan Gunung Sugih yaitu sebanyak 451 pemilih. Terbanggi Subing berstatus kampung yang berada di Kecamatan Gunung Sugih. Pemilih pemula tersebut memiliki hak politik yang sama dengan kelompok pemilih lain. Pada pelaksanaan pemilu legislatif 2009 lalu di Kampung Terbanggi Subing dipimpin oleh Suhardi selaku Ketua PPS. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Suhardi pada tanggal 29 April 2014 mengenai pelaksanaan pemilu legislatif 2009 di Kampung Terbanggi Subing, diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu legislatif 2009 mencapai 80% sedangkan tingkat partisipasi politik pemilih pemula mencapai 85% sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Memang saya yang menjadi Ketua PPS pada pemilu legislatif 2009. Partisipasi politik masyarakat pada saat itu mencapai 80%. Data lengkapnya sudah tidak ada lagi. Namun menurut saya partisipasi politik pemilih pemula saat itu bisa dikatakan mencapai 85%. Kegiatan politik pemilih pemula pada pemilu legislatif 2009 sebagian besar hanya melaksanakan hak politiknya yaitu mencoblos, belum pada kegiatan politik lebih lanjut lagi”.

Pemilih pemula biasanya mendapat pengetahuan politik dari agen-agen sosialisasi terdekat di lingkungannya. Sehingga berdasarkan penjelasan di atas serta dengan memperhatikan data persentase tingkat partisipasi politik pada pemilu legislatif 2009 lalu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh agen sosialisasi politik terhadap partisipasi politik pemilih pemula pada pemilu legislatif 2014 serta siapa agen sosialisasi politik yang paling berpengaruh pada partisipasi politik pemilih pemula di Kecamatan Gunung Sugih tepatnya di Kampung Terbanggi Subing pada pemilu legislatif tahun 2014.

Penelitian tentang pemilih pemula, sosialisasi politik, dan partisipasi politik telah banyak dilakukan oleh peneliti lain. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut meskipun sama-sama meneliti tentang pemilih pemula, partisipasi politik atau sosialisasi politik. Perbedaan tersebut dapat dikaji dari segi permasalahan, kerangka teori serta metode penelitian yang digunakan. Hal itu diuraikan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Topan Umboh bersumber dari jurnal Eksekutif yang berjudul “Partisipasi Politik Pemula dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Minahasa Tenggara (Suatu Studi di Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara)”. Ringkasan hasil penelitiannya: bentuk

partisipasi politik pemilih pemula meliputi berbicara masalah politik, kampanye, dan pemberian suara; pemilih pemula antusias pada pemilihan umum kepala daerah; terdapat faktor pendorong dan penghambat partisipasi politik pemilih pemula; dan faktor politik yang mempengaruhi pilihan pemilih pemula beragam. Jika ditinjau dari permasalahan penelitian, terdapat perbedaan yaitu pada penelitian tersebut mengkaji tentang partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum kepala daerah dengan meneliti bentuk dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula sedangkan penelitian ini mengkaji tentang pengaruh agen sosialisasi politik terhadap partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu legislatif. Selain itu dari aspek kerangka teori yang digunakan pada kedua penelitian terdapat beberapa perbedaan yaitu pada penelitian tersebut kerangka teorinya meliputi partisipasi politik, pemilih pemula, pemilihan umum kepala daerah, konsep kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik dalam pemilihan umum kepala daerah sedangkan pada penelitian ini kerangka teorinya meliputi sosialisasi politik, partisipasi politik, pemilih pemula, dan pemilihan umum. Selain itu, dari aspek metode penelitian yang digunakan pada penelitian tersebut adalah kualitatif sedangkan pada penelitian ini menggunakan *mix methods* (penggabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif).

2. Penelitian yang dilakukan oleh J. W. Batawi bersumber dari jurnal Uniera yang berjudul “Tingkat Kesadaran Politik Pemilih Pemula dalam Pilkada Suatu Refleksi *School-Based Democracy Education* (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara Tahun 2010)”.

Ringkasan hasil penelitiannya adalah tingkat kesadaran siswa sebagai pemilih pemula dalam pilkada menunjukkan kesadaran yang didasarkan pada pemahaman dan pengalaman belajar konsep berpolitik di sekolah. Kesadaran ikut berpolitik telah menjadi kekuatan individu siswa dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika ditinjau dari permasalahan penelitian, pada penelitian tersebut mengkaji tentang tingkat kesadaran siswa SLTA sebagai pemilih pemula dalam pilkada dalam konteks berpolitik dan penerapan sekolah sebagai laboratorium demokrasi (*School-Based Democracy Education*), sedangkan pada penelitian ini yang menjadi permasalahan penelitian adalah mengenai pengaruh agen sosialisasi politik terhadap partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu legislatif. Aspek kerangka teori yang digunakan pada kedua penelitian tersebut juga terdapat beberapa perbedaan karena disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian tersebut kerangka teori yang digunakan meliputi pendidikan dan kesadaran politik bagi siswa, kebudayaan remaja/siswa sebagai pemilih pemula dalam pilkada, pendidikan demokrasi di lingkup sekolah, dan *school-based democracy education model* sedangkan pada penelitian ini, kerangka teorinya meliputi sosialisasi politik, partisipasi politik, pemilih pemula, dan pemilihan umum. Selain itu, dari aspek metode penelitian yang digunakan pada penelitian tersebut adalah observasi, wawancara langsung, dan pengisian kuesioner, sedangkan pada penelitian ini metode yang digunakan adalah *mix methods* (penggabungan dari metode kuantitatif dan kualitatif).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Devi Tasary bersumber dari jurnal *Citizenship* yang berjudul “Peran Teman Sebaya sebagai Agen Sosialisasi Politik dalam Menumbuhkan Perilaku Memilih Remaja pada Pemilihan Walikota Tahun 2011 RT 02 RW 01 Kecamatan Umbulharjo”. Ringkasan hasil penelitian adalah teman sebaya sebagai agen sosialisasi politik memiliki peran dan pengaruh dalam menumbuhkan perilaku memilih di kalangan remaja. Jika ditinjau dari permasalahan penelitian, pada penelitian tersebut permasalahannya terkait peran teman sebaya dalam menentukan pilihan walikota di Yogyakarta sedangkan pada penelitian ini yang akan diteliti adalah pengaruh agen sosialisasi politik terhadap partisipasi politik pemilih pemula. Dalam penelitian ini teman sebaya sebagai bagian dari agen sosialisasi politik disamping agen-agen sosialisasi politik lain yang akan diteliti pengaruhnya terhadap partisipasi politik. Kerangka teori yang digunakan pada kedua penelitian juga terdapat perbedaan. Pada penelitian tersebut kerangka teori yang digunakan adalah sosialisasi politik, remaja, teman sebaya, peran teman dalam menumbuhkan perilaku memilih sedangkan pada penelitian ini kerangka teorinya meliputi sosialisasi politik, partisipasi politik, pemilih pemula, dan pemilihan umum. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian tersebut adalah deskriptif kualitatif sedangkan pada penelitian ini adalah metode *mix methods* (penggabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif).
4. Penelitian yang dilakukan oleh Herkulanus Roni bersumber dari jurnal *Aspirasi* yang berjudul “Pola Perilaku Pemilih Pemula pada Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 (Studi di Kecamatan Bengkayang,



Kabupaten Bengkayang)”. Ringkasan hasil penelitian adalah pemilih pemula dalam memilih mendapat pengaruh dari orang tua, kerabat, juga karena loyalitas terhadap etnis. Jika ditinjau dari permasalahan penelitian, pada penelitian tersebut mengkaji tentang pola perilaku pemilih pemula dalam pemilihan Gubernur Kalimantan Barat karena menurut peneliti tersebut masih terdapat banyaknya persoalan politik yang terjadi pada pemilih pemula di daerah itu seperti kuatnya pengaruh etnik dan agama pada saat pemilihan, sedangkan pada penelitian ini yang akan dikaji adalah pengaruh agen sosialisasi politik terhadap partisipasi politik pemilih pemula pada pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Lampung Tengah. Kerangka teori yang digunakan pada penelitian tersebut mencakup pola perilaku pemilih pemula dari segi pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan pilihan rasional sedangkan pada penelitian ini kerangka teorinya meliputi sosialisasi politik, partisipasi politik, pemilih pemula, dan pemilihan umum. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian tersebut adalah kualitatif sedangkan pada penelitian ini adalah *mix methods* (penggabungan metode kuantitatif dan kualitatif).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah agen sosialisasi politik berpengaruh terhadap partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu legislatif tahun 2014 di Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah?

2. Seberapa besar pengaruh agen sosialisasi politik terhadap partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu legislatif tahun 2014 di Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah?
3. Siapakah agen sosialisasi politik yang paling berpengaruh terhadap partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu legislatif tahun 2014 di Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh agen sosialisasi politik terhadap partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu legislatif tahun 2014 di Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh agen sosialisasi politik terhadap partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu legislatif tahun 2014 di Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.
3. Mengetahui agen sosialisasi politik yang paling berpengaruh terhadap partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu legislatif tahun 2014 di Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan salah satu kajian ilmu politik terutama mengenai pengaruh agen sosialisasi politik terhadap partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu legislatif tahun 2014 khususnya di Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait yang ingin mengetahui strategi sosialisasi politik yang sesuai diterapkan melalui agen sosialisasi politik guna meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula khususnya pada pemilu legislatif.